

# **LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI  
PPID PELAKSANA  
SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
2022**

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan dan pemberian informasi. PPID berperan dalam memenuhi kebutuhan publik, baik secara langsung atau tatap muka, serta secara online untuk menjamin informasi publik. Cara ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan penguasaan dari sistem aplikasi yang disediakan. Era keterbukaan informasi saat ini, publik semakin pintar dan bijak dalam menggunakan informasi, terutama dalam kaitannya untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Publik menginginkan adanya pemerintahan yang transparan, yang menekankan adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, pemerintah juga memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul berkomitmen untuk memberikan layanan PPID sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang KIP, meskipun dalam keterbatasan personil di Stewan Bantul, PPID tetap dilayani sebagaimana hak masyarakat untuk mengetahui informasi tentang pemerintahan, tentunya dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KIP.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Bantul masih menjadi satu dengan ruang pelayanan Bagian Umum Sekretariat DPRD tepatnya pada subbagian Humas, Protokol dan Publikasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul memiliki meja *Front office* yang berada di Lobi Gedung DPRD Kabupaten Bantul, pemohon PPID manual akan diterima oleh petugas *Front Office* lalu akan diarahkan ke Bagian Umum pada subbagian Humas Protokol dan Publikasi.

Pada layanan online, pelayanan PPID dilayani dengan berbagai media online, seperti media sosial DPRD Kabupaten Bantul yang terdiri dari IG Youtube dan Facebook. Permohonan data informasi oleh pemohon akan dipenuhi dan diberikan melalui media yang digunakan oleh pemohon. Selain media sosial, layanan online pelayanan data oleh sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dilayani dengan Nomor WA operator Humas Protokol sekretariat DPRD Kabupaten Bantul [https://bit.ly/Humas DPRD Bantul](https://bit.ly/Humas_DPRD_Bantul). Permintaan informasi publik di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2022 seputar peraturan daerah tentang DPRD dan agenda kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul.

Selain warga masyarakat kabupaten Bantul yang menanyakan informasi DPRD Kabupaten Bantul dan informasi kegiatan di sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, DPRD Kabupaten Bantul juga melayani permintaan Data oleh DPRD dari Kabupaten/Kota Lain yang ingin sharing perihal pemerintahan kepada DPRD Kabupaten Bantul. Pada tahun 2022

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul menerima 893 kunjungan dengan total peserta berkisar 12.909 peserta. Menurut data yang terekam dalam formulir kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bantul. Beberapa informasi yang sering diminta tentang Renja DPRD, Jadwal Agenda DPRD yang tertuang dalam Banmus dan Laporan Kinerja DPRD Kabupaten Bantul.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana SEKRETARIAT DPRD, Kabupaten Bantul ada 5 (lima) orang dengan kualifikasi berpendidikan 4 (empat) orang sarjana, 1 (satu) orang Pasca Sarjana. Personil tersebut terbagi dalam 2 (dua) orang yang bertugas sebagai Front Office yang akan mengarahkan pemohon informasi ke petugas dalam dan 3 (tiga) orang di subagian Humas protokol dan Publikasi bertugas memberikan informasi yang dikehendaki oleh masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan informasi, petugas dari subagian humas protokol dan publikasi bekerjasama dengan bagian-bagian yang ada di sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, sesuai dengan bidang informasi yang dikehendaki oleh masyarakat.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya. Kegiatan PPID Pelaksana SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara khusus, pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam kegiatan kehumasan.

Pelaksanaan kegiatan PPID di sekretariat DPRD kabupaten Bantul tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat melalui permohonan resmi, namun sekretariat DPRD juga melaksanakan Publikasi terhadap berbagai informasi yang dipandang merupakan kebutuhan publik.



# Dorong Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Infrastruktur

BANTUL, Jolo Jolo - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun 2023, kini di fokuskan pada peningkatan infrastruktur daerah. Oleh sebab itu, APBD 2023 untuk infrastruktur menjadi fokus dalam anggaran Tahun 2022. Hal ini lantaran pemulihan ekonomi menjadi semangat program-program yang terdapat dalam APBD 2023 guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata.

Hal ini lantaran pemulihan ekonomi menjadi semangat program-program yang terdapat dalam APBD 2023 guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata. Hal ini lantaran pemulihan ekonomi menjadi semangat program-program yang terdapat dalam APBD 2023 guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata.

Hal ini lantaran pemulihan ekonomi menjadi semangat program-program yang terdapat dalam APBD 2023 guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata. Hal ini lantaran pemulihan ekonomi menjadi semangat program-program yang terdapat dalam APBD 2023 guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata.

Hal ini lantaran pemulihan ekonomi menjadi semangat program-program yang terdapat dalam APBD 2023 guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata. Hal ini lantaran pemulihan ekonomi menjadi semangat program-program yang terdapat dalam APBD 2023 guna mengoptimalkan pemulihan ekonomi sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata.



Hanung Raharjo  
Wakil Ketua DPRD Bantul



SAH: Ketua DPRD Hanung Raharjo saat memandangkan rencana anggaran APBD 2023 di ruang rapat DPRD Bantul, Rabu (23/11).

# Pendidikan & Kesehatan Tetap Jadi Perhatian

BANTUL, Jolo Jolo - Abaikan anggapan Presiden Jokowi bahwa sektor pendidikan dan kesehatan adalah sektor yang paling tahan krisis, APBD 2023 tetap menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.

Menurut data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul, APBD 2023 pada sektor pendidikan dibelanjakan sebesar Rp608.356.314.496, sedangkan pada sektor kesehatan Rp244.697.262.092.



Nur Subiyantoro  
Ketua DPRD Bantul

# Melalui Pariwisata & Pertanian Bangkitkan Masyarakat

RAMA: Suasana tepian pantai saat dipadati pelaku UMKM Sekeloa yang menjajakan barang dan jasa mereka kepada wisatawan yang datang dari berbagai daerah, beberapa wisata lokal.

RAMA: Suasana tepian pantai saat dipadati pelaku UMKM Sekeloa yang menjajakan barang dan jasa mereka kepada wisatawan yang datang dari berbagai daerah, beberapa wisata lokal.



RAMA: Suasana tepian pantai saat dipadati pelaku UMKM Sekeloa yang menjajakan barang dan jasa mereka kepada wisatawan yang datang dari berbagai daerah, beberapa wisata lokal.

Artikel dengan judul 'Sering Blusukan di Pelosok, Intens Mendampingi Pelaku UMKM'. Artikel ini membahas upaya pemerintah dalam mendukung pelaku UMKM melalui kunjungan ke lokasi mereka.

Artikel dengan judul 'Dorong Fokus Anggaran untuk Tingkatkan Ekonomi Masyarakat'. Artikel ini membahas prioritas anggaran pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Gambar 1. Publikasi kegiatan Pimpinan DPRD di Media Cetak.



Gambar 2. Publikasi Kegiatan Komisi A DPRD Kabupaten Bantul



Gambar 3. Publikasi Kegiatan Komisi B DPRD Kabupaten Bantul

INFO PARLEMEN BANTUL

**Komis C DPRD Bantul Soroti Wilayah Perbatasan**

## Berkomitmen Infrastruktur Setara dengan Wilayah Tetangga

Pembangunan infrastruktur mulai bergulir masif lagi. Setelah dua tahun pandemi Covid-19, Komisi C DPRD Bantul pun mendorong pembekap memperhatikan kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan. Terutama jalan.

YA, kondisi sebagian ruas jalan di wilayah perbatasan Bantul cukup memprihatinkan. Baik wilayah perbatasan Kabupaten Bantul dengan Kota Jogja maupun Kabupaten Sleman. "Memang banyak yang 'gantung begini,'" jelas Ketua Komisi C DPRD Bantul Dwi Kristiantoro di ruang kerjanya kemarin (26/9).

Dwi sendiri kerap melintasi beberapa wilayah perbatasan. Hasilnya, Dwi melihat kualitas infrastruktur jalan raya milik Kabupaten Bantul dibanding Kabupaten Sleman maupun Kota Jogja memang jomplang. Salah satunya ruas jalan di Kaparawon Kaibahan. Peristiwa di Pedukuhan Gatak.

"Ini Bantul jalannya kecil dan bergelombang. Begitu rusak Sleman, jalannya lebar dan halus," ucapnya. Ruas jalan ini, poliklub PDI Perjuangan ini meyakini seharusnya diperbaiki. Sehingga dibebaskan. Lantaran ruas jalan ini sangat padat. Terutama saat pagi dan sore hari.

Tak jarang pula, ruas jalan itu dilintasi kendaraan besar. Seperti tronton. Maklum, Kaparawon Tamanan itu tidak hanya padat penduduk. Sebagian wilayahnya juga banyak berdiplak dan gudang.

"But sipis mobil kendaraan pribadi saja sudah semuanya harus

salah satu ruas jalan di Kaparawon Selayu dan Kaibahan. Dwi memastikan Komisi C terus memperhatikan wilayah perbatasan. Karena itu, Komisi C bakal mendorong pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur untuk wilayah perbatasan. "Secara bertahap pasti infrastruktur Kabupaten Bantul nanti bisa sama dengan kabupaten lain," tambahnya.

Selain diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Bantul Arni Tyas Palupi. Menurutnya, jomplangnya kualitas infrastruktur tidak hanya jalan kabupaten. Melainkan juga jalan-jalan kampung.

Poliklub Partai Golkar ini rutin blusukan ke beberapa kabupaten. Di antaranya Kaparawon Selayu dan Kaibahan. Hasilnya, tidak sedikit warga yang mengkilang bantuan perbaikan jalan kampung. "Seperti di Kalurahan Ngrotharjo utara inggrosi itu banyak. Kemudian wilayah Selayu pingiran Sungai Progo," katanya.

Selain ruas jalan, kata Arni, wilayah perbatasan juga perlu mendapatkan perhatian lain. Di antaranya pemasangan lampu penerangan jalan umum dan pembangunan taman. Dari pengalaman blusukan, Arni berpendapat sebagai warga masih kebanyakan perhalus tata cara membangun perumahan kearahannya. Dari itu, Arni pun ingin memberikan pendampingan. Harapannya lelak warga bisa mandiri. "Kalau sudah mengetahui cara membangun rumah, ke depan mereka kan bisa lebih enak," tegasnya.

Sant blusukan, Arni tetap memuliskan semangat kemadirian kepada warga. Itu bertujuan agar warga tidak hanya sekedar butuh kebutuhan sarana infrastruktur di wilayahnya. Lebih dari itu juga peduli dengan potensi ekonomi di sekitarnya. Meyakini berperserikatan Yogyakarta International Airport.

"Jangan sampai Kabupaten Bantul hanya menjadi penonton," ingatnya. (F/raam/rg)




**Dari Bantul jalannya kecil dan bergelombang. Begitu rusak Sleman, jalannya lebar dan halus. Buat sipis mobil kendaraan pribadi saja sudah semuanya harus tarung siap. Apalagi bersipis dengan tronton atau Transjogja."**

**DWI KRISANTORO,**  
Ketua Komisi C DPRD Bantul

rumah. hal itu bisa mengganggu program-program lain. "Padahal, program-program lain juga sama pentingnya," ujarnya.

Karena itu, Dwi berpendapat perlu upaya lain agar rencana ini bisa terrealisasi. Caranya dengan mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. "Kalau Kabupaten Bantul bisa memperoleh DAK, ruas jalan itu bisa dibangun pada 2024," ucapnya optimistis.

Selain dengan DPUPK, kata Dwi, Komisi C juga sering membahas pembangunan dan penataan wajah wilayah perbatasan dengan dinas lingkungan hidup (DLH). Lantaran wajah wilayah perbatasan perlu diperbaiki dengan taman. "Har ada estetikanya," katanya.

Dalam kesempatan ini, Dwi juga menyebut ada alokasi anggaran perbaikan ruas jalan untuk wilayah perbatasan pada APBD 2022. "Kalau

**FUNGSI/PENGHASILAN** Rombongan Komisi C DPRD Bantul melakukan inspeksi mendadak proyek pembangunan di salah satu wilayah perbatasan.

Suratman ST, Ketua Komisi D DPRD Bantul, mengatakan bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan pondasi utama sekaligus tulang punggung masa depan bangsa dan negara Indonesia. Karena dari situ, sebagai tempat membentuk karakter mental anak-anak untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan. "Satu yang perlu kita perhatikan adalah, kalau anak kita mau pintar itu tentunya fasilitas dan sarana pendukung sekolah harus tersedia dengan baik," ujar Suratman.

Dalam konteks ini Komisi D DPRD Bantul melihat, tahun ini terdapat beberapa sekolah. Khususnya pada SD SMP fasilitasnya memang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Kondisi beberapa sekolah juga sangat mengawatirkan. Terkait rusaknya gedung dan sarana prasarana lainnya. Untuk itu kata Suratman, Komisi D DPRD Bantul minta kepada pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu segera melakukan pemeliharaan.

Karena beberapa sekolah SD, SMP di Kabupaten Bantul pembangunan sudah dilakukan beberapa tahun lalu. Hasil monitoring beberapa tempat sudah mulai rusak. Jangan sampai dalam kurun waktu yang akan datang sekolah itu akan rusak semua. Dengan kondisi tersebut tentunya akan memberatkan APBD. "Untuk itu saya minta kepada pemerintah Kabupaten Bantul untuk segera cek data. Berapa banyak sekolah yang rusak. Terus nanti selanjutnya kita

alokasikan anggaran baik itu dari APBD atau dari Dana Alokasi Khusus (DAK)," jelasnya.

Suratman juga mengatakan, hasil inspeksi mendadak Komisi D DPRD Bantul menemukan SD Sawit sudah saatnya direhab. Dari aspek fasilitas gedung, sebel dan semuanya hampir 50% mesti ada diperbaiki. Selain itu ada juga SD 3 Bantul, sudah ada dua ruang kelas dikosongkan. Karena sangat mengkhawatirkan anak-anak, bahkan kegiatan belajar mengajar dihalangi di tempat aman. "Setiap ada pem-

bahasan di Komisi D Bapak Kepala Dinas saya minta untuk menyampaikan hal-hal yang itu perlu disampaikan. Terkait kebutuhan mendesak yang harus segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Menurut Suratman, ternyata sejak beberapa tahun lalu pembangunan gedung SD sangat sedikit sekali. Tentunya pemerintah untuk segera memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan yang ada di Kabupaten Bantul mulai jenjang PAUD, TK, SD dan SMP. Pendidikan merupakan

tempat untuk membentuk karakter, mental anak. Oleh karena itu, dasarnya harus kuat, jika tidak kokoh nanti kedepannya juga kurang bagus. "Perhatian dari pemerintah Bantul saya kira sudah sesuai, karena pemerintah Bantul sudah membebaskan alokasi 20% dari APBD Bantul untuk pendidikan," jelas Suratman.

Kondisi begitu, alokasi anggaran tersebut masih perlu ditambah. Oleh karena itu, Komisi D mendukung penuh, meski juga melihat kekuatan APBD Bantul.

Karena srah kedepannya, setiap sekolah yang punya lahan bisa diakibatkan anggaran untuk taman. Orientasi dari taman itu ialah mewujudkan rasa nyaman anak-anak dalam belajar.

"Komisi punya komitmen memperhatikan pendidikan dan sarana prasarana. Karena pendidikan dasar ini sangat penting. Namanya dasar atau pondasi itu memang harus kuat. Karena hal itu untuk membentuk karakter, mental anak, mulai jenjang PAUD, SD SMP, SMA hingga perguruan tinggi," jelasnya. (Roy)

Gambar 4 Publikasi Komisi C DPRD Kabupaten Bantul

**KOMISI D DPRD BANTUL**

## Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan



**Suratman ST**  
Ketua Komisi D DPRD Bantul.

**BANTUL, (KR)** - Komisi D DPRD Kabupaten Bantul punya komitmen mendorong peningkatan kualitas sektor pendidikan. Tekat tersebut didasari fakta bahwa pendidikan sebagai pondasi utama melahirkan generasi cerdas penerus bangsa. Oleh karena itu, Komisi D DPRD Bantul bakal mengawal anggaran 20% dari APBD Bantul tetap alokasi diprioritaskan untuk sektor pendidikan.

"Jadi fokus perhatian dari Komisi D salah satunya terkait dengan pendidikan di Bantul. Mulai jenjang PAUD, TK, SD, SMP, sederajat. Oleh karena itu, DPRD Bantul dan pemerintah Kabupaten Bantul tentunya tidak mau ketinggalan disektor pendidikan," ujar Ketua Komisi D DPRD Bantul, Suratman ST, Rabu (16/11).

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, bahwa pendidikan merupakan pondasi utama sekaligus tulang punggung masa depan bangsa dan negara Indonesia. Karena dari situ, sebagai tempat membentuk karakter mental anak-anak untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan. "Satu yang perlu kita perhatikan adalah, kalau anak kita mau pintar itu tentunya fasilitas dan sarana pendukung sekolah harus tersedia dengan baik," ujar Suratman.

Dalam konteks ini Komisi D DPRD Bantul melihat, tahun ini terdapat beberapa sekolah. Khususnya pada SD SMP fasilitasnya memang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Kondisi beberapa sekolah juga sangat mengawatirkan. Terkait rusaknya gedung dan sarana prasarana lainnya. Untuk itu kata Suratman, Komisi D DPRD Bantul minta kepada pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu segera melakukan pemeliharaan.

Karena beberapa sekolah SD, SMP di Kabupaten Bantul pembangunan sudah dilakukan beberapa tahun lalu. Hasil monitoring beberapa tempat sudah mulai rusak. Jangan sampai dalam kurun waktu yang akan datang sekolah itu akan rusak semua. Dengan kondisi tersebut tentunya akan memberatkan APBD. "Untuk itu saya minta kepada pemerintah Kabupaten Bantul untuk segera cek data. Berapa banyak sekolah yang rusak. Terus nanti selanjutnya kita



**Ketua Komisi D DPRD Bantul, Suratman (tiga dari kanan) dan jajaran melakukan inspeksi mendadak di salah satu sekolah dasar di Bantul.**

alokasikan anggaran baik itu dari APBD atau dari Dana Alokasi Khusus (DAK)," jelasnya.

Suratman juga mengatakan, hasil inspeksi mendadak Komisi D DPRD Bantul menemukan SD Sawit sudah saatnya direhab. Dari aspek fasilitas gedung, sebel dan semuanya hampir 50% mesti ada diperbaiki. Selain itu ada juga SD 3 Bantul, sudah ada dua ruang kelas dikosongkan. Karena sangat mengkhawatirkan anak-anak, bahkan kegiatan belajar mengajar dihalangi di tempat aman. "Setiap ada pem-

bahasan di Komisi D Bapak Kepala Dinas saya minta untuk menyampaikan hal-hal yang itu perlu disampaikan. Terkait kebutuhan mendesak yang harus segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Menurut Suratman, ternyata sejak beberapa tahun lalu pembangunan gedung SD sangat sedikit sekali. Tentunya pemerintah untuk segera memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan yang ada di Kabupaten Bantul mulai jenjang PAUD, TK, SD dan SMP. Pendidikan merupakan

tempat untuk membentuk karakter, mental anak. Oleh karena itu, dasarnya harus kuat, jika tidak kokoh nanti kedepannya juga kurang bagus. "Perhatian dari pemerintah Bantul saya kira sudah sesuai, karena pemerintah Bantul sudah membebaskan alokasi 20% dari APBD Bantul untuk pendidikan," jelas Suratman.

Kondisi begitu, alokasi anggaran tersebut masih perlu ditambah. Oleh karena itu, Komisi D mendukung penuh, meski juga melihat kekuatan APBD Bantul.

Karena srah kedepannya, setiap sekolah yang punya lahan bisa diakibatkan anggaran untuk taman. Orientasi dari taman itu ialah mewujudkan rasa nyaman anak-anak dalam belajar.

"Komisi punya komitmen memperhatikan pendidikan dan sarana prasarana. Karena pendidikan dasar ini sangat penting. Namanya dasar atau pondasi itu memang harus kuat. Karena hal itu untuk membentuk karakter, mental anak, mulai jenjang PAUD, SD SMP, SMA hingga perguruan tinggi," jelasnya. (Roy)

**KOMISI D DPRD KABUPATEN BANTUL**

Ketua : Suratman ST (PDI)

Wakil Ketua : H Yasasuri S.P.M.P.M.I (P PKB)

Sekretaris : Drs Ahmad Agus Sofwan, M.P.I (PKS)

**ANGGOTA**

- Nur Yuni Astuti, S.Sos, SH (P PDI)
- Enggar Suryo Jatmiko, SE,MM (P Gerindra)
- H. Edwin Taminu Mardiyanto, SE (P PAN)
- Paidi, SIP (P P Golkar)
- Suradil (P PKB)
- Eko Setiawan AB (P Persatuan Demokrat)
- Drs Supriyono, M.Si (P Persatuan Demokrat)



**Suratman mengesek proses belajar mengajar di sebuah SD di Bantul.**



**Komis D DPRD Bantul melakukan monitoring sekolah di Bantul.**

Gambar 5 Publikasi Kegiatan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul



Gambar 6 Publikasi Propemperda DPRD KABUPATEN Bantul

Publikasi terhadap informasi DPRD Kabupaten Bantul tidak sebatas pada media Cetak saja, namun Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga mempublikasikan informasi-informasi yang dipandang dibutuhkan oleh masyarakat melalui media elektronik Radio dan televisi.



Gambar 7 Publikasi Media Televisi untuk Pimpinan DPRD



Gambar 8 Publikasi Media Televisi untuk Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bantul

Dalam kegiatan publikasi melalui media elektronik, masyarakat memiliki kesempatan untuk menanyakan langsung kepada Wakil Rakyat atau anggota DPRD Kabupaten Bantul tentang hal-hal yang ingin diketahui oleh masyarakat. Sebagai pendukung kegiatan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi PPublik, sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga mengundang dinas terkait dengan materi yang diinginkan, sehingga masyarakat dapat langsung mendalami permasalahan sesuai dengan tema diskusi.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul bertekad membetikan pelayanan keterbukaan informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bantul, khususnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain media cetak dan media elektronik lokal, sekretariat DPRD Kabupaten Bantul melalui kegiatan kehumasan juga mempublikasikan informasi-informasi publik melalui media online.

Berikut beberapa contoh publikasi oleh sekretariat DPRD Kabupaten Bantul untuk masyarakat pengguna jaringan internet.

<https://radarjogja.jawapos.com/bantul/2022/09/29/fokus-apbd-2023-untuk-pemulihan-ekonomi/>

Lebih Dekat dengan Hanung Raharjo ST  
**Fokus APBD 2023 untuk Pemulihan Ekonomi**  
29 September 2022 11:53 AM



APBD PERUBAHAN: Hanung Raharjo menandatangani berita acara perubahan KUPA-PPAD 2022 kemarin sore. (3/11/2022)

**RADAR JOGJA** – Pemulihan ekonomi. Itulah semangat program-program yang tertuang dalam rancangan APBD 2023. Harapannya, perekonomian Kabupaten Bantul pascapandemi Covid-19 bisa kembali pulih lebih cepat.

Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo ST menyebut, rancangan APBD 2023 memprioritaskan tiga sektor. Yakni, perindustrian, pertanian, dan pariwisata. Tiga sektor ini menduduki mayoritas warga Bumi Projo tamansari. "Sehingga tiga sektor ini harus dijejaki agar segera kembali bangkit," tegas Hanung di ruang kerjanya kemarin (26/9).

Beranda • D.I. Yogyakarta •

**Dewan Minta Rencana Kenaikan Cukai Dipertimbangkan Kembali**  
Erna Sari - D.I. Yogyakarta  
22 September 2022

Komentar BACIKAN



PARAHK: Kordinator Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bantul dengan Wakil pelaksana bidang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di ruang Rapat Komisi II DPRD Bantul pada Kamis, 22/09/22. (ERNA SARI/SUSANTO/OSLO/OGJA)

**Harian Jogja**  
HOME NEWS PEMILU 2024 JOGJAPOLITAN PENDIDIKAN EKIBIS OTOTEKNO WISATA SPA  
Home > Bantul

**APBD Perubahan 2022, Rasionalisasi Anggaran Mencapai Rp1,4 Miliar**  
A Media Digital 19 Oktober 2022 - 18:51 WIB © Anief/unsido



Wakil Ketua DPRD Bantul Nur Subianto (kanan) menyerahkan draft APBD Perubahan 2022 kepada Wakil Bupati Bantul (kiri) Pluntharu - Indonesia



DPRD KABUPATEN BANTUL

Penulis: Satriya Wijaya • Editor: Sholihul Hadi • 13 Agu 2022, 18:40:07 WIB • 828 kali Dibaca • 0 komentar

**Tahun 2023, Fokus pada Pemulihan Ekonomi**

SHARE Facebook Twitter Email LINE WhatsApp Telegram More

KORANBERNASJID, BANTUL -- DPRD Bantul menggelar Rapat Paripurno (Rapur) dengan agenda Penyampaian Laporan, Soran dan Pಂದapat Badan Anggaran dan Pengambilan

### C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	5
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	15-20 mnt
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	5
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	-

Permohonan informasi publik di sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dapat terlayani dengan baik, masyarakat yang meminta informasi tersebut dapat menerima layanan dengan baik dengan waktu yang cukup singkat.

Beberapa informasi yang diinginkan masyarakat dapat segera dipenuhi karena pada dasarnya data tersebut sudah disediakan melalui fasilitas online, namun karena ketidaktahuan maka beberapa masyarakat mendatangi langsung kantor sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.

Selain masyarakat yang menginginkan informasi secara langsung ke sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga melayani permintaan informasi melalui akun media sosial DPRD Kabupaten Bantul. Beberapa permintaan juga dapat kami berikan sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Tidak hanya masyarakat kabupaten Bantul, pemohon informasi juga berasal dari DPRD Kabupaten/Kota diluar DIY.

### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 Pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 Tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 Permohonan

4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 Putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 Gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 Putusan

## **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### 1. Kendala eksternal

- Kendala eksternal yang dihadapi adalah masih minimnya pemohon informasi di SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Bantul, dikarenakan PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Minat masyarakat untuk mencari informasi publik di DPRD Kabupaten Bantul belum maksimal. Saat ini permintaan informasi banyak diminta oleh antar Lembaga DPRD dari luar daerah Kabupaten Bantul.
- Pemohon informasi di era saat ini lebih menginginkan informasi secara cepat dan langsung dilayani tidak dengan jeda waktu yang lama. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul mencoba untuk mempublikasikan segala informasi yang berhak di akses oleh Masyarakat luas, disamping media sosial, subdomain DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga mengembangkan aplikasi jarimas sebagai wujud komitmen keterbukaan informasi publik di DPRD Kabupaten Bantul.

### 2. Kendala internal

- Keterbatasan SDM pada SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Bantul sehingga respon tentang PPID belum maksimal.
- Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang diharuskan untuk menjalankan tusi utama sehingga tugas di PPID seringkali terabaikan.

**F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK  
MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.**

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a) Perlu adanya petugas khusus untuk menangani permintaan informasi publik ke DPRD Kabupaten Bantul.
- b) Memperbanyak media informasi yang akan disampaikan kepada publik meskipun belum ada permintaan dari publik
- c) Memiliki ruang / desk pelayanan informasi tersendiri untuk pelayanan PPID.

Bantul, 29 Januari 2023  
PPID Pelaksana



PRAPTANUGRAHA, S.SOS., MH.  
NIP.197112171991011001

*Lampiran I.* **KEGIATAN PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD**

**KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022**

<b>N0.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PELAKSANAAN</b>
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Menerima permintaan informasi manual	Januari – Desember
3	Rapat Koordinasi penerimaan permohonan informasi	Januari – Desember
4	Koordinasi pengelolaan website	Januari – Desember
5	Rapat-rapat penerimaan audiensi masyarakat	Januari – Desember
6	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari 2023